



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 128 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKASI RENCANA PROGRAM
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

14. Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2019, untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah dalam masa transisi sebagai akibat rangkaian pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati guna memberikan arah sekaligus sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi penyusunan RKPD Tahun 2019.
- (2) Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 bertujuan untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan dan berkaitan dengan masa transisi berakhirnya RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Temanggung.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- b. Capaian Indikator Utama Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
- c. Tujuan dan sasaran Pembangunan Tahun 2019;
- d. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
- e. Indikasi Program Prioritas Daerah Tahun 2019.

BAB IV
SISTEMATIKA DAN PENYUSUNAN
Pasal 4

Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III : Capaian Indikator Utama Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
- d. Bab IV : Tujuan dan sasaran Pembangunan Tahun 2019
- e. Bab V : Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019
- f. Bab VI : Indikasi Program Prioritas Daerah Tahun 2019
- g. Bab VII : Penutup

Pasal 5

Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 disusun sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 merupakan pedoman perencanaan yang menjadi bagian dari tahapan RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023
- (2) Target Kinerja dan prioritas pembangunan Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 tidak dapat diubah oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati terpilih melaksanakan dan melanjutkan program dan kegiatan Tahun 2018 yang telah direncanakan dan ditetapkan sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya Tahun 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **27 Desember 2017**

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **27 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi.

Tahun 2019 adalah tahun transisi dalam periode perencanaan pembangunan daerah, karena RPJMD Tahun 2013-2018 sudah berakhir dan RPJMD periode Tahun 2018-2023 baru akan ditetapkan dalam kurun waktu enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Maka berdasarkan amanat Pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masa transisi Tahun 2019 ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah untuk masa 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten, gambaran umum kondisi daerah, capaian kinerja pemerintahan periode sebelumnya, identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud perumusan Indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 merupakan sebuah koridor perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif, yaitu selain tim penyusun dari unsur Bappeda, BPPKAD, Bagian Pemerintahan Setda dan Bagian Ortala Setda, juga melibatkan seluruh perangkat daerah dan Kecamatan.

Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang berisi kelompok sasaran, prioritas program pembangunan daerah, indikasi rencana program, dan indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2019 selanjutnya akan digunakan menjadi dasar penyusunan RKPd Tahun 2019 dan APBD Tahun Anggaran 2019.

C. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- A. Aspek Geografi
- B. Aspek Demografi
- C. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

BAB III SASARAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

- A. Sasaran Pembangunan Tahun 2019
- B. Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2019

BAB IV INDIKASI RENCANA PROGRAM TAHUN 2019

BAB V INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2019

BAB VI PENUTUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi.

Tahun 2019 adalah tahun transisi dalam periode perencanaan pembangunan daerah, karena RPJMD Tahun 2013-2018 sudah berakhir dan RPJMD periode Tahun 2018-2023 baru akan ditetapkan dalam kurun waktu enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Maka berdasarkan amanat Pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masa transisi Tahun 2019 ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah untuk masa 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten, gambaran umum kondisi daerah, capaian kinerja pemerintahan periode sebelumnya, identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud perumusan Indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 merupakan sebuah koridor perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif, yaitu selain tim penyusun dari unsur Bappeda, BPPKAD, Bagian Pemerintahan Setda dan Bagian Ortala Setda, juga melibatkan seluruh perangkat daerah dan Kecamatan.

Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang berisi kelompok sasaran, prioritas program pembangunan daerah, indikasi rencana program, dan indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2019 selanjutnya akan digunakan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2019 dan APBD Tahun Anggaran 2019.

C. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- A. Aspek Geografi
- B. Aspek Demografi
- C. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

BAB III SASARAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

- A. Sasaran Pembangunan Tahun 2019
- B. Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2019

BAB IV INDIKASI RENCANA PROGRAM TAHUN 2019

BAB V INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2019

BAB VI PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. ASPEK GEOGRAFI

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 87.065 Ha dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Temanggung

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candiroti
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.354 Dusun, 147 lingkungan, 1.529 RW, dan 5.692 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Secara astronomis terletak antara 110°23'-110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'-7°32'35" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Temanggung secara geoekonomis berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0%-70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Prahu (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi : datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500-1.450 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, barat sampai dengan utara.

Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian
Kabupaten Temanggung

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	400 - 500	8.468	10,21	Temanggung, Jumo, Tembarak, Candiroto, Pringsurat, Kandangan
2	500 - 750	36.194	43,80	Parakan, Bansari, Kledung, Bulu, Kedu, Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan, Gemawang, Jumo, Selopampang, Tembarak, Kaloran, Wonoboyo, Tretep, Pringsurat, Bejen, Candiroto, Kandangan
3	750 - 1.000	20.079	24,30	Parakan, Bansari, Kledung, Bulu, Kedu, Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan, Gemawang, Jumo, Selopampang, Tembarak, Kaloran, Wonoboyo, Tretep, Pringsurat, Bejen, Candiroto, Kandangan, Ngadirejo
4	1.000 - 1.500	11.428	13,80	Parakan, Bansari, Kledung, Bulu, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Tlogomulyo, Kaloran, Selopampang, Candiroto
5	> 1.500	6.429	7,80	Parakan, Bulu, Tretep, Wonoboyo, Selopampang, Ngadirejo, Tlogomulyo
Jumlah		82.598	100	

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dilihat dari sisi geologi, dari lahan seluas 87.065 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat (32,13%), Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir.

B. ASPEK DEMOGRAFI

Berdasarkan Statistik Kabupaten Temanggung Jumlah penduduk pada Tahun 2016 adalah 752.059 jiwa, terdiri dari laki-laki 377.168 jiwa (50,15%) dan perempuan 375.341 jiwa (49,85%). Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 196.385 rumah tangga dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 3,83 jiwa per rumah tangga.

Kepadatan penduduk tahun 2016 rata-rata 864 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif merata. Sebaran penduduk di tiap kecamatan, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.
Sebaran Penduduk di Tiap Kecamatan, Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		Laki-Laki	Perempuan	Total		
1	Parakan	25.926	25.993	51.919	6,90	2.336
2	Kledung	12.491	12.221	24.712	3,28	767
3	Bansari	11.297	10.992	22.289	2,96	989
4	Bulu	24.120	23.324	47.444	6,30	1.102
5	Temanggung	40.173	41.277	81.450	10,82	2.439
6	Tlogomulyo	11.500	11.408	22.908	3,04	922
7	Tembarak	14.908	14.677	29.585	3,93	1.102
8	Selopampang	9.314	9.343	18.657	2,48	1.079
9	Kranggan	23.324	23.568	46.892	6,23	814
10	Pringsurat	25.053	24.802	49.855	6,63	871
11	Kaloran	20.365	20.579	40.944	5,44	641
12	Kandangan	24.693	24.322	49.015	6,51	626
13	Kedu	28.934	28.601	57.535	7,65	1.646
14	Ngadirejo	26.563	26.243	52.806	7,02	991
15	Jumo	14.346	14.488	28.834	3,83	983
16	Gemawang	16.381	16.064	32.445	4,31	483
17	Candiroto	15.196	15.402	30.598	4,07	510
18	Bejen	10.032	9.860	19.892	2,64	289
19	Tretep	10.111	9.851	19.962	2,65	593
20	Wonoboyo	12.441	12.326	24.767	3,29	563
	Jumlah	377.168	375.341	752.509	100	864

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu.

Tabel 2.4.
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka kelahiran kasar (CBR) per 1.000	7,83	7,95	9,36	9,42	6,41
2	Angka kematian kasar (CDR) per 1.000	4,74	4,90	5,30	5,38	8,24
3	Angka kematian bayi (IMR) per 1.000	11,50	15,41	15,00	16,82	12,7
4	Migrasi Masuk	3.119	3.198	3.189	1.513	5.108
5	Migrasi Keluar	3.392	2.696	3.498	1.684	4.709
	Laju pertumbuhan penduduk (‰)	1,02	0,98	0,96	0,93	0,90

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		D IV/ Sarjana	DI/DII / DIII	SLTA	SLTP	SD	Tidak/ belum tamat SD	Tidak/ Belum sekolah	
1	Parakan	1.673	1.025	7.493	6.546	9.854	10.976	17.529	55.096
2	Kledung	149	114	1.447	3.295	7.365	5.286	10.687	28.343
3	Bansari	284	191	1.542	3.138	5.175	10.525	3.410	24.265
4	Bulu	776	484	3.934	5.580	10.526	17.922	9.710	48.932
5	Temanggung	5.107	2.457	16.790	11.549	18.412	13.597	16.008	83.920
6	Tlogomulyo	204	139	1.500	3.001	5.801	5.644	6.888	23.177
7	Tembarak	482	308	3.115	4.526	7.027	5.924	10.097	31.479
8	Selopampang	312	198	1.912	2.670	5.826	4.227	5.281	20.426
9	Kranggan	1.008	577	6.094	8.151	9.310	10.202	14.283	49.625
10	Pringsurat	713	444	5.344	8.202	13.143	5.220	19.249	52.315
11	Kaloran	564	436	4.104	7.088	11.056	6.142	17.356	46.746
12	Kandangan	724	499	4.038	6.750	11.073	8.004	21.618	52.706
13	Kedu	1.281	828	6.905	7.247	14.004	17.641	14.165	61.171
14	Ngadirejo	1.005	788	5.770	8.884	16.927	11.206	12.535	57.115
15	Jumo	452	336	2.572	4.200	7.467	6.543	8.933	30.503
16	Gemawang	205	190	1.380	3.785	8.688	8.879	11.082	34.209
17	Candiroto	541	519	2.716	3.999	8.855	11.153	5.698	33.481
18	Bejen	205	202	1.533	3.421	6.653	3.415	6.479	21.908
19	Tretep	86	88	498	2.563	6.219	5.693	6.209	21.356
20	Wonobojo	193	209	1.398	3.720	8.470	5.315	7.667	26.972
JUMLAH		15.964	10.032	79.185	108.315	191.851	173.514	224.884	803.745
Persentase (%)		1,9	1,25	9,85	13,48	23,83	21,59	27,98	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Secara umum mayoritas penduduk Temanggung masih setara tingkat pendidikan SD sebanyak 23,83% dan SMP sebanyak 13,48%.

C. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi/PDRB Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12.
Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Temanggung 2012 - 2016

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan %	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan %
2012	11.841.494,84	8,93	10.740.983,02	4,27
2013	13.088.402,25	10,53	11.299.342,97	5,20
2014	14.592.453,38	11,49	11.867.679,59	5,03
2015	16.107.061,67	10,38	12.486.494,54	5,21
2016	17.526.473,01	8,81	13.110.795,64	5,00

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan nasional sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 2.13.
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012 - 2016

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2012	4,27	5,34	6,03
2013	5,20	5,11	5,56
2014	5,06	5,27	5,01
2015	5,17	5,44	4,88
2016	5,00	5,28	5,02

Sumber : Gambaran PDRB Kabupaten Temanggung 2016

Kontribusi sektor pembentuk PDRB atas dasar harga berlaku selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14.
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung ADHB 2012-2016 (%)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan & Perikanan	26,93	26,57	25,59	25,80	25,27
B Pertambangan & Penggalian	0,80	0,78	0,83	0,87	0,89
C Industri Pengolahan	25,12	25,50	26,47	26,53	26,83
D Pengadaan Listrik & Gas	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
E Pengadaan Air, Penge Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
F Konstruksi	4,47	4,37	4,48	4,63	4,62
G Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda	21,20	20,99	20,72	20,32	20,35
H Transportasi & Pergudangan	4,10	4,18	4,17	4,26	4,27
I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,53	1,51	1,46	1,53	1,58
J Informasi & Komunikasi	1,41	1,39	1,38	1,25	1,22
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3,03	3,07	3,14	3,19	3,28
L Real Estat	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74
M,N Jasa Perusahaan	0,29	0,32	0,32	0,33	0,34
O Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,14	3,04	2,93	2,90	2,83
P Jasa Pendidikan	4,22	4,53	4,63	4,55	4,59
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,02	1,08	1,08	1,08
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,76	1,82	1,90	1,85	1,91
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Gambaran PDRB Kabupaten Temanggung 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mulai tahun 2014 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha Industri Pengolahan. Sedangkan struktur ekonomi berdasarkan distribusi persentase menurut kelompok kategori dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Temanggung
Menurut Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I Atas Dasar Harga Berlaku					
Lapangan Usaha Primer	27,75	27,35	26,42	26,68	26,17
Lapangan Usaha Sekunder	29,77	30,04	31,10	31,31	31,59
Lapangan Usaha Tersier	42,48	42,61	42,48	42,01	42,24
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II. Atas Dasar Harga Konstan 2010					
Lapangan Usaha Primer	27,10	26,23	24,55	24,41	24,03
Lapangan Usaha Sekunder	29,42	29,66	30,36	30,58	30,74
Lapangan Usaha Tersier	43,48	44,11	45,09	45,01	45,23
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Gambaran PDRB Kabupaten Temanggung 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi kelompok kategori lapangan usaha primer (lapangan usaha kategori A dan B) pada tahun 2016 yaitu kelompok lapangan usaha yang mengandalkan sumber daya alam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Temanggung sebesar 26,17 persen. Sementara itu kontribusi kategori lapangan usaha sekunder (lapangan usaha kategori C, D, E dan F) yaitu kelompok lapangan usaha yang memproduksi barang memberi andil sebesar 31,59 Persen. Sedangkan kontribusi di kelompok kategori lapangan usaha tersier (lapangan usaha kategori G sampai dengan kategori U) yaitu lapangan usaha yang bergerak di bidang produksi jasa, memberikan kontribusi sebesar 42,24 persen. Penyumbang terbesar kelompok lapangan usaha tersier adalah lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha jasa pendidikan serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

2. Inflasi

Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakatpun akan ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah. Perkembangan inflasi selama 10 tahun terakhir

Tabel 2.18.
Perkembangan Laju Inflasi
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2006-2016

No	Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2007	6,89	6,24	6,59
2	2008	12,36	9,55	11,06
3	2009	4,16	3,32	2,78
4	2010	7,35	6,88	6,96
5	2011	2,42	2,68	3,79
6	2012	4,73	4,24	4,30
7	2013	7,01	7,99	8,33
8	2014	7,81	8,22	8,36
9	2015	2,74	2,73	3,35
10	2016	2,42	2,36	3,02

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Jika diamati angka inflasi Kota Temanggung selama kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu tahun 2007-2016 dalam perkembangannya ternyata cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja. Pada tahun 2008 angka inflasi Kota Temanggung mencapai dua digit yaitu 12,36 persen. Pemicu terjadinya inflasi yang cukup tinggi di tahun 2008 tersebut lebih banyak dari sisi kenaikan biaya produksi (*cost push inflations*). Meningkatnya harga minyak dunia yang akhirnya memaksa Pemerintah untuk menaikkan harga BEM memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap tingkat inflasi. Selain itu, meningkatnya harga komoditas pangan dunia seperti kebutuhan bahan pangan impor jenis kedelai, jagung dan terigu sejak akhir tahun 2007 yang otomatis meningkatkan biaya produksi perusahaan memberikan

angka inflasi yang sangat besar. Demikian juga dengan adanya kelangkaan sumber energi baik gas maupun minyak di berbagai daerah serta kekurangan suplai listrik yang mengharuskan terjadinya pemadaman juga berperan meningkatkan inflasi karena mendorong pembengkakan biaya produksi. Inflasi terendah Kota Temanggung selama 10 tahun terakhir terjadi pada tahun 2011 dan terulang kembali pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,42 persen. Pada 2016, inflasi cukup terjaga karena kondisi perekonomian cukup stabil dan tidak ada kebijakan dari pemerintah yang mengakibatkan gejolak kenaikan harga.

3. PDRB Perkapita

Secara konseptual PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil. Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB Perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perkembangannya tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.15.
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2012-2016

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	16.337.377,85	7,83	14.819.032,60	3,21
2013	17.882.505,18	9,46	15.438.137,93	4,18
2014	19.748.487,14	10,43	16.060.953,69	4,03
2015	21.597.662,68	9,36	16.742.910,81	4,25
2016	23.290.715,47	7,84	17.422.775,86	4,06

Sumber : Gambaran PDRB Kabupaten Temanggung 2016

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai PDRB perkapita selalu naik yang menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/ dinikmati oleh warga Temanggung saja,

akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Perkembangan angka IPM Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10.
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung
Tahun 2012-2016

No	Variabel	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	64,01	65,52	65,97	67,07	67,07
1.	Angka Harapan Hidup /AHH (Tahun)	75,26	75,31	75,34	75,35	75,39
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,05	11,39	11,69	11,89	11,89
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,08	6,13	6,18	6,52	6,55
3.	Pengeluaran riil per kapita per bulan (Rp)	419.670	422.084	553.244	627.626	679.317

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2017

IPM Kabupaten temanggung masih berada dibawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung dengan kabupaten/kota dalam regional eks karisidenan Kedu dan Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11.
IPM dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota
di Eks Karisidenan Kedu, Tahun 2011 – 2015

Kab/Kota	IPM					Peringkat IPM				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Kebumen	64.05	64.47	64.86	65.67	66.87	5	5	5	5	5
Purworejo	69.11	69.40	69.77	70.12	70.37	2	2	2	2	2
Wonosobo	63.07	64.18	64.57	65.20	65.70	6	6	6	6	6
Mageiang	64.16	64.75	65.86	65.35	67.13	3	4	3	3	3
Temanggung	64.14	64.91	65.52	65.97	67.07	4	3	4	4	4
Kota Magelang	74.47	75.00	75.29	75.79	76.39	1	1	1	1	1
JAWA TENGAH	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49					

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari : (1)Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2)Kesejahteraan sosial, serta (3)Seni budaya dan olah raga.

5. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun per jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikali 1.000.

Tabel 2.23.
Angka Kematian Bayi
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

NO	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah kematian bayi (jiwa)	151	173	167	183	136
2.	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	12.371	11.228	11.010	10.935	10.733
3.	Angka kematian bayi	12,21	15,41	15,17	16,8	12,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Angka kematian bayi pada tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif sebagaimana tersebut pada tabel 2.23. Pada tahun 2016 angka ini mengalami penurunan 4,1 % dari tahun sebelumnya, yaitu dari 16,82 % menjadi 12,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil, bayi.

6. Angka Harapan Hidup

Pada tahun 2016 angka harapan hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung telah mencapai 75,37 tahun. AHH yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang sejak lahir hingga akhir hayat. Bila

dibandingkan dengan AHH tahun 2011 yang angkanya 75,22 tahun maka terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan.

Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Tabel 2.24.
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup	75,26	75,31	75,34	75,35	75,37

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016, Dinas Kesehatan Tahun 2017,
*angka sementara

7. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak dilihat dari berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun.

Gizi buruk pada balita dapat dilihat melalui kegiatan pemantauan status gizi (PSG). Setiap tahun dilakukan kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan mengambil sejumlah sampel balita di tiap-tiap wilayah Puskesmas untuk mengetahui proporsi status gizi balita di Kabupaten Temanggung mulai dari gizi lebih sampai gizi buruk sebagai salah satu upaya untuk memantau tumbuh kembang balita. Hasil kegiatan PSG yang ditampilkan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 terlihat proporsi status gizi buruk berdasarkan BB/U tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 0,85 persen dari tahun 2015 yang sebesar 0,75 persen. Persentase gizi balita dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.
Kondisi Status Gizi Balita
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase balita gizi buruk	1,30	0,93	2,00	0,75	0,85
2.	Persentase balita gizi kurang	14,40	13,47	14,00	6,56	5,81
3.	Persentase balita gizi baik	83,00	83,75	82,20	89,9	92,21
4.	Persentase balita gizi lebih	1,30	1,85	1,80	2,79	1,98

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk cenderung fluktuatif, angka ini selalu ada di bawah 10%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional

yaitu kurang dari 5%.

Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacangan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.

8. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil seperti gerakan sayang ibu, pemberian makanan tambahan ibu hamil, pelayanan kesehatan setelah melahirkan, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi.

Tabel 2.26.
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	88,92	62,34	127,16	27,00	93,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa angka kematian ibu selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, kadang jumlahnya menurun dan bertambah secara drastis. Tahun 2014 naik 127,16 %, tahun 2015 turun 27 %, tahun 2016 turun 93,17 %.

9. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum pangan dan non pangan esensial. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin namun perlu memperhatikan pula tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 2.28.
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Tingkat kemiskinan (%)	12,32	12,42	11,55	11,76	11,55

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2017, *angka sementara

Tingkat kemiskinan penduduk (makro) Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun cenderung menurun dari angka 12,32 di Tahun 2012 menjadi 11,55 di Tahun 2016 walau sempat meningkat di Tahun 2013.

10. Persentase Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Grafik 2.1.
Persentase Penduduk Bekerja
Kabupaten Temanggung, Tahun 2011-2015



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Persentase penduduk yang bekerja cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan banyak penduduk yang bekerja sebagai karyawan tidak tetap, pekerja musiman dan faktor migrasi penduduk.

11. Perbandingan TPAK, TPT, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk

Selain rasio jumlah penduduk yang bekerja juga perlu diukur tingkat pengangguran terbuka sebagai proporsi pengangguran terbuka

terhadap angkatan kerja dan kemudian disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan faktor jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.29.

Tabel 2.29.
TPAK, TPT, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2016

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1.	2012	4,27	1,02	77,33	3,39
2.	2013	5,20	0,98	76,70	4,67
3.	2014	5,60	0,96	76,73	3,19
4.	2015	5,17	0,93	75,47	1,50
5.	2016	5,06*	0,98*	n.a	2,22*

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2017, *Angka Sementara

Pada tabel diatas terlihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif, angka laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami penurunan, TPAK cenderung fluktuatif dan TPT cenderung mengalami penurunan. TPT menunjukkan jumlah pengangguran nilainya kecil/hanya sedikit, hal ini karena memang sebagian besar penduduk adalah penduduk yang bekerja, walaupun pada kenyataannya banyak yang bekerja sebagai pekerja tidak tetap/hanya kadang-kadang bekerja/bekerja paruh waktu/pekerja musiman. Dengan perkembangan kebutuhan tenaga kerja saat ini maka salah satu fokus kebijakan dalam pembangunan pendidikan di daerah saat ini adalah melalui pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu.

BAB III

SASARAN DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode tahun 2018-2023 baru akan disahkan dalam kurun waktu enam bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik, sedangkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 membutuhkan pedoman dan acuan, khususnya dalam menetapkan sasaran dan prioritas program pembangunan daerah, dimana dalam perumusannya mendasarkan pada gambaran umum kondisi daerah, capaian kinerja pemerintahan periode sebelumnya, identifikasi permasalahan pembangunan, dan isu strategis daerah dengan metode analisis data dan desk dengan seluruh Perangkat Daerah.

A. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Sasaran pembangunan Tahun 2019 disusun berdasarkan pengelompokan bidang yang dibagi dalam lima kelompok, yaitu: 1) Kelompok Sasaran Bidang Infrastruktur; 2) Kelompok Sasaran Bidang Ekonomi; 3) Kelompok Sasaran Bidang Pembangunan Manusia Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan; 4) Kelompok Sasaran Bidang Pembangunan Manusia Non Pelayanan Dasar; dan 5) Kelompok Sasaran Bidang Pemerintahan.

1. Kelompok Sasaran Bidang Infrastruktur

Kelompok sasaran bidang infrastruktur ada lima, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
- b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
- c. Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan dan sistem informasi terintegrasi;
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan; dan
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

2. Kelompok Sasaran Bidang Ekonomi

Kelompok Sasaran bidang ekonomi ada sepuluh, yaitu:

- a. Meningkatnya ketahanan pangan;
- b. Meningkatnya produktivitas pertanian;
- c. Meningkatnya produktivitas peternakan;
- d. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan;
- e. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian;
- f. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan;
- g. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi;
- h. Meningkatnya investasi;
- i. Meningkatnya kesempatan kerja, dan
- j. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata

3. Kelompok Sasaran Bidang Pembangunan Manusia Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan

kelompok sasaran pembangunan manusia pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan ada dua, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan; dan
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

4. Kelompok Sasaran Bidang Pembangunan Manusia Non Pelayanan Dasar

Kelompok Sasaran bidang pembangunan manusia non pelayanan dasar ada enam, yaitu:

- a. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin;
- b. Meningkatnya perlindungan sosial;
- c. Meningkatnya pemberdayaan responsif gender;
- d. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- e. Meningkatnya kesadaran dan minat budaya baca; dan
- f. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

5. Kelompok Sasaran Bidang Pemerintahan

Kelompok Sasaran bidang pemerintahan ada lima, yaitu:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah;
- b. Meningkatnya ketersediaan barang bersubsidi;
- c. Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara;
- d. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa; dan
- e. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Penentuan prioritas program pembangunan daerah Tahun 2019 didasarkan pada sasaran pembangunan Tahun 2019, gambaran umum kondisi daerah, capaian kinerja pemerintahan periode sebelumnya, potensi unggulan daerah dan isu strategis Tahun 2017. Prioritas program pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Infrastruktur

Bidang Infrastruktur terdiri dari sembilan program prioritas, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Jalan;
- b. Program Penyelenggaraan Jembatan;
- c. Program Penyelenggaraan Tata Ruang
- d. Program Penyediaan Sanitasi dan Pemukiman;
- e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Teknologi Informasi;
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- g. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
- h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah; dan
- i. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.

2. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi terdiri dari sepuluh program prioritas yaitu:

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- b. Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Teknologi, dan Agribisnis Tanaman Pangan;
- c. Program Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak dan Hasil Ternak;
- d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- e. Program Industri Kecil dan Menengah;
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- h. Program Peningkatan Iklim Investasi;
- i. Program Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- j. Program Pengembangan Kepariwisata.

3. Bidang Pembangunan Manusia Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kesehatan

Bidang Pembangunan Manusia Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kesehatan terdiri dari enam prioritas program yaitu:

- a. Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar;
- c. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Program Peningkatan Keselamatan Ibu;
- e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak; dan
- f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

4. Bidang Pembangunan Manusia Non Pelayanan Dasar

Bidang Pembangunan Manusia non pelayanan dasar terdiri dari enam prioritas program, yaitu:

- a. Program Penanganan Fakir Miskin;
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
- c. Program Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
- d. Program Pengembangan Budaya Baca;
- e. Program Penataan Administrasi Kependudukan; dan
- f. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

5. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan terdiri dari duabelas prioritas program, yaitu:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Program Penelitian dan Pengkajian;
- c. Program Penataan Kelembagaan, Tatalaksana dan Peningkatan Pelayanan Publik;

- d. Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah;
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Program Peningkatan Pendapatan Daerah;
- g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah;
- j. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- k. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan; dan
- l. Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Keterkaitan antara sasaran dan prioritas program pembangunan daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2019

KELOMPOK BIDANG PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	
1 Bidang Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Program Penyelenggaraan Jalan	
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Program Penyelenggaraan Jembatan	
		Persentase Penurunan Pelanggaran Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	
		Cakupan Sanitasi Pemukiman (AMPL) Yang Layak	Program Penyediaan Sanitasi Pemukiman	
		Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Program Pengelolaan Lalu Lintas	
	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Dan Sistem Informasi Terintegrasi	Cakupan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi E-Government	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Teknologi Informasi
			Cakupan Sistem Informasi E-Government Yang Terintegrasi	
			Indeks Pencemaran Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan		Indeks Pencemaran Udara	Program Perlindungan Dan Konservasi Lingkungan Hidup
			Indeks Tutupan Vegetasi/Lahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2 Bidang Ekonomi	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana	Persentase Pelayanan Sampah Perkotaan	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	
		Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita		
		Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita		
		Produktivitas Padi	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Teknologi, dan Agribisnis Tanaman Pangan	
Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Produktivitas Jagung	Produktivitas Ternak Besar	Program Peningkatan Populasi Dan Produksi Ternak Dan Hasil Ternak	
		Produktivitas Ternak Kecil		

KELOMPOK BIDANG PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
3	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan	Tingkat Konsumsi Ikan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Program Pengembangan Industri
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Program Pengembangan Perdagangan
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Program Pengembangan Koperasi Dan UKM
	Meningkatnya Investasi	Laju Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	- Program Perluasan Kesempatan Kerja - Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata Dan Kebudayaan	Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Leng Of Stay (Lama Tinggal Wisatawan)	Program Pengembangan Kepariwisata
	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah	- Program Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan - Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar - Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD - Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP - Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup Prevalensi Balita Gizi Buruk (0-60 Bulan)	- Program Peningkatan Keselamatan Ibu - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak - Program Perbaikan Gizi Masyarakat

KELOMPOK BIDANG PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS
4 Bidang Pembangunan Manusia Non Pelayanan Dasar	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Program Pemangangan Fakir Miskin
	Meningkatnya Perlindungan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mendapat Perlindungan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi	
	Meningkatnya Pemberdayaan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Program Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak
	Meningkatnya Kesadaran Dan Minat Budaya Baca	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan E-KTP	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Persentase Pelayanan Akte Kelahiran Tepat Waktu	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
		Tingkat Konsistensi Program Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Hasil Penelitian Dan Pengkajian Yang Ditindaklanjuti Dalam Kebijakan Daerah	Program Penelitian Dan Pengkajian
		Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penataan Kelembagaan, Tatalaksana Dan Peningkatan Pelayanan Publik
5 Bidang Pembangunan Pemerintahan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Penataan Kelembagaan, Tatalaksana Dan Peningkatan Pelayanan Publik
		Nilai EKPPD	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan
		Opini Pemeriksaan BPK	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Pendapatan Daerah

KELOMPOK BIDANG PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	
		Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	
		Persentase RAPERDA Yang Disahkan Menjadi PERDA Tepat Waktu Sesuai Prolegda	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
		Meningkatnya Pengendalian Inflasi	Ketepatan Pengendalian Inflasi Daerah	Program Pengembangan Dan Pengendalian Perekonomian Daerah
		Terwujudnya ASN Sesuai Kompetensi	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Analisis Jabatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun	Program Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Evaluasi Dan, Informasi Desa
		Angka Kriminalitas	Indeks Ketenteraman Dan Keterliban Masyarakat	Program Pemeliharaan Ketenteraman Dan Keterliban Umum
			Cakupan Penegakan Perda Dan Perbup	

BAB IV
INDIKASI RENCANA PROGRAM TAHUN 2019

Penyusunan program dan indikator program merupakan langkah teknokratis dalam menterjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sasaran dan prioritas program pembangunan daerah. Sebagaimana arsitek perencanaan, program dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu : program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program yang di dalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan penganggarannya harus diprioritaskan.

Program strategis dan operasional kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun pada program yang bersifat strategis menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan wajib dan pilihan.

Berdasarkan sasaran dan prioritas program pembangunan daerah, serta identifikasi permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan maka rumusan program dan indikator program Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Program dan Indikator Program Tahun 2019

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
1.	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	Dindikpora
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	
2.	Program peningkatan akses Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APK SD Sederajat	%	Dindikpora
		Persentase APM SD Sederajat	%	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	
3.	Program peningkatan mutu pendidikan SD	Persentase SD Terakreditasi Minimal B	%	Dindikpora
		Angka Kelulusan	%	
		Persentase SD Negeri yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	%	
4.	Program peningkatan akses Pendidikan SMP	Persentase APK SMP Sederajat	%	Dindikpora
		Persentase APM SMP Sederajat	%	
		Angka Melanjutkan SMP sederajat ke SMA sederajat	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
5.	Program peningkatan mutu pendidikan SMP	Prosentase SMPterakreditasi Minimal B	%	Dindikpora
		Angka Kelulusan	%	
		Persentase SMP Negeri yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana	%	
6.	Program peningkatan akses pendidikan PAUD	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	Dindikpora
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	
		Persentase APM PAUD	%	
7.	Program peningkatan mutu PAUD	Prosentase TK Terakreditasi Minimal B	%	Dindikpora
8.	Program Peningkatan mutu Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	%	Dindikpora
		Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	%	
9.	Program pembinaan kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	Dindikpora
10.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase Pelatih Olahraga Bersertifikat	%	Dindikpora
		Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	%	
		Persentase Atlet Berprestasi	%	
11.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Gizi kurang pada Anak usia 0-60 bulan	%	Dinkes
		Prevalensi Gizi Buruk pada Anak usia 0-60 bulan	%	
		Cakupan ASI eksklusif 0-6 bulan	%	
12.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase rumah tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	Dinkes
		Persentase Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	
13.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	%	Dinkes
14.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	%	Dinkes
		Persentase desa ODF (Open Defecation Free)	%	
15.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Universal Child Immunisation (UCI) Desa dan/atau Kelurahan	%	Dinkes
		Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
		Persentase desa dan/atau kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	
16.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	Dinkes
		Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	
		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	
17.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	%	Dinkes
18.	Program upaya Kesehatan Perorangan	Angka kunjungan baru (contact rate)	%	Dinkes
		Cakupan pelayanan rujukan	%	
19.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	Persentase Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	%	Dinkes
		Persentase Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	%	
		Persentase Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	
20.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	Dinkes
21.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	Dinkes
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	
22.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi minimal Madya	%	Dinkes
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta terakreditasi	%	
23.	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	Persentase gedung Puskesmas sesuai standar	%	Dinkes
		Persentase gedung Puskesmas Pembantu sesuai standar	%	
		Cakupan alat kesehatan yang memenuhi standar	%	
24.	Program Penyediaan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Puskesmas yang melakukan pelayanan farmasi sesuai standar	%	Dinkes
		Persentase Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	%	
		Persentase kantin sehat di sekolah	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
25.	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	Dinkes
26.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	RSUD
27.	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	RSUD
28.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Indeks Kinerja RSUD	%	RSUD
		Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	
29.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan sedang	%	DPUPKP
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung	%	
30.	Program Penyelenggaraan Jembatan	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik dan sedang	%	DPUPKP
31.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik dan sedang sesuai kewenangannya	%	DPUPKP
32.	Program Pembangunan saluran drainase /gorong -gorong	Persentase sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	DPUPKP
33.	Program Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Perkotaan	%	DPUPKP
34.	Program penyediaan Air Minum	Cakupan Layanan Air Minum yang layak	%	DPUPKP
35.	Program Penyediaan Sanitasi Pemukiman	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	%	DPUPKP
		Persentase sarpras air limbah kawasan permukiman	%	
		Persentase sarana drainase kawasan permukiman	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
25.	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	Dinkes
26.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	RSUD
27.	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	RSUD
28.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Indeks Kinerja RSUD	%	RSUD
		Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	
29.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan sedang	%	DPUPKP
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung	%	
30.	Program Penyelenggaraan Jembatan	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik dan sedang	%	DPUPKP
31.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik dan sedang sesuai kewenangannya	%	DPUPKP
32.	Program Pembangunan saluran drainase /gorong -gorong	Persentase sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	DPUPKP
33.	Program Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Perkotaan	%	DPUPKP
34.	Program penyediaan Air Minum	Cakupan Layanan Air Minum yang layak	%	DPUPKP
35.	Program Penyediaan Sanitasi Permukiman	Cakupan sanitasi permukiman yang layak	%	DPUPKP
		Persentase sarpras air limbah kawasan permukiman	%	
		Persentase sarana drainase kawasan permukiman	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
36.	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	%	DPUPKP
37.	Program Fasilitasi Pertanahan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	DPUPKP
38.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Tersedianya Alat Berat dengan Kondisi Baik	%	DPUPKP
39.	Program Pengelolaan RTH	Cakupan RTH publik terhadap IKK	%	DPUPKP
40.	Program Pengembangan Sarana Perkotaan	Persentase Penerangan Jalan Umum di luar Jalan Kabupaten	%	DPUPKP
41.	Program Pembinaan Jasa Kontruksi	Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	DPUPKP
42.	Program Penataan Kota	Cakupan penataan kota di ibukota kecamatan	%	DPUPKP
43.	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	%	Satpol PP dan Damkar
		Rasio Petugas Satpol PP	rasio	
		Rasio PPNS	rasio	
44.	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Rasio Linmas per RT	rasio	Satpol PP dan Damkar
45.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	Satpol PP dan Damkar
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	
		Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	
46.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Dinsos
		Persentase Kampung Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana	%	
		Persentase anak telantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
47.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga , masyarakat dan panti/barehsos	%	Dinsos
		Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	%	
		Persentase Tuna Sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	%	
48.	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam penanganan PMKS/ pendampingan sosial	%	Dinsos
		Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Kelembagaan dalam penanganan PMKS	%	
49.	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	%	Dinsos
		Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	
50.	Program Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase peserta Pelatihan yang menjadi Wirausaha baru	%	Dinaker
		Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	%	
		Persentase Penempatan Transmigran	%	
51.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja yang telah mendapatkan upah sesuai UMK	%	Dinaker
		Persentase pemenuhan Sarana Hubungan Industrial sesuai standar		
		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	
52.	Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta Pelatihan Kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	Dinaker
		Persentase LPKS yang ter-akreditasi	%	
		Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi	%	
53.	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	%	Dindalduk KBPPPA
		Persentase terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
		Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	
54.	Program Kepesertaan KB	Persentase kepesertaan KB aktif	%	Dindalduk KBPPPA
		Persentase kepesertaan KB baru	%	
		Persentase kepesertaan KB baru terhadap Perkiraan Permintaan Masyarakat	%	
55.	Program Peningkatan Pelayanan KB	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	Dindalduk KBPPPA
		Persentase ketersediaan alat obat kontrasepsi oleh pemerintah kabupaten	%	
56.	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase Anggaran Responsive Gender dalam APBD	%	Dindalduk KBPPPA
		Persentase Lansia Perempuan yang mendapatkan program layanan pemberdayaan perempuan	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Pilah Gender dan Anak	%	
57.	Program perlindungan hak perempuan dan anak	Rasio Perempuan korban kekerasan dan TPPO	%	Dindalduk KBPPPA
		Rasio Anak korban kekerasan dan TPPO	%	
		Cakupan terbentuknya kecamatan layak anak	%	
58.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera III	%	Dindalduk KBPPPA
		Persentase Keluarga Sejahtera III plus	%	
		Persentase Kampung KB	%	
59.	Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita yang aktif	%	Dindalduk KBPPPA
		Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif	%	
		Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia yang aktif	%	
60.	Program Advokasi dan Penyuluhan	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Penyuluh KB desa/kelurahan	%	Dindalduk KBPPPA
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan	%	
		Rasio Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan	%	
61.	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Teknologi dan Agribisnis Tanaman Pangan	Produktifitas Tanaman Pangan	%	Dintan Pangan
		Persentase Peningkatan Mutu Tanaman Pangan	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
62.	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan Agribisnis Hortikultura	Produktifitas Hortikultura unggulan		Dintan Pangan
		Persentase Peningkatan mutu Hortikultura unggulan	%	
63.	Program Peningkatan Produksi, Penerapan Tehnologi dan Agribisnis Perkebunan	produktifitas Perkebunan unggulan	%	Dintan Pangan
		mutu Perkebunan unggulan	%	
64.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Peningkatan cadangan pangan masyarakat	%	Dintan Pangan
		Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah	%	
		Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	%	
65.	Program pemberdayaan SDM dan Kelembagaan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas SDM dan lembaga penyuluh	%	Dintan Pangan
		Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	%	
		Persentase perkembangan lembaga usaha ekonomi petani	%	
66.	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	Persentase Tutupan Vegetasi	%	DLH
		Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	
67.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	DLH
		Persentase Usaha dan Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	%	
		Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	%	
68.	Program Pentaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	DLH
		Persentase Penghargaan di Bidang lingkungan Hidup	%	
		Terbentuknya Kelembagaan Masyarakat peduli Lingkungan	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
69.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan Timbulan Sampah di Perkotaan melalui TPS 3R	%	DLH
		Persentase Sampah Terangkut terhadap Timbulan Sampah se-Kabupaten Temanggung	%	
		Persentase Pengoperasian TPA	%	
70.	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	%	Dindukcapil
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	
		Persentase Pelayanan Surat Pindah Datang tepat waktu	%	
71.	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Akta Kelahiran tepat waktu	%	Dindukcapil
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	
		Cakupan Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian tepat waktu	%	
72.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase Sarana Prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik	%	Dindukcapil
		Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	
		Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	
73.	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	Dinpermades
		Persentase peningkatan jumlah desa berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun (IDM)	%	
		Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	%	
74.	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat yang ditetapkan dengan Perdes	%	Dinpermades
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	%	
		Persentase Peningkatan Strata Posyandu	%	
75.	Program Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Evaluasi dan, Informasi Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RPJMDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	Dinpermades
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	
		Persentase desa yang melaksanakan tahapan PKD dalam proses perencanaan	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
76.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	Dinpermades
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	
77.	Program Pengembangan lembaga Ekonomi masyarakat dan desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Aktif	%	Dinpermades
		Persentase Pasar Desa yang Aktif	%	
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif	%	
78.	Program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa	Persentase Pemberdayaan di Kawasan yang telah di tetapkan	%	Dinpermades
		Persentase desa yang melakukan kerjasama	%	
79.	Program Pengelolaan lalu lintas	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	%	Dinhub
80.	Program Pengelolaan parkir	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	Dinhub
81.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang layak	%	Dinhub
		Persentase Bengkel yang Bersertifikasi	%	
		Persentase bengkel yang berklasifikasi A	%	
82.	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase jaringan jalan yang dilewati angkutan umum	%	Dinhub
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	
83.	Program pengembangan komunikasi dan informasi publik	Persentase PPID Badan publik yang aktif	%	Dinkominfo
		Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif	%	
		Persentase Kepatuhan LPP Terhadap Norma Siaran	%	
84.	Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi	Cakupan tersedianya Jaringan Intranet		Dinkominfo
		Persentase Sistem Informasi yang berfungsi optimal	%	
85.	Program Pengembangan Data Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan Dokumen Publikasi Data Statistik Daerah yang tepat waktu	%	Dinkominfo
		Persentase Data yang Terintegrasi	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
86.	Program Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase Sistem Informasi yang sudah tersedia keamanan jaringannya	%	Dinkominfo
87.	Program Pengembangan Industri	Persentase IKM Agro Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	Dinperindag Kop dan UKM
		Persentase IKM Aneka Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	
88.	Program Pengembangan Perdagangan	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%	Dinperindag Kop dan UKM
		Persentase Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%	
89.	Program Pengelolaan Pasar	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	Dinperindag Kop dan UKM
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	
90.	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	Persentase koperasi sehat	%	Dinperindag Kop dan UKM
		Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	
		Persentase Usaha Mikro yang berkembang	%	
91.	Program Pengkajian Potensi Investasi dan Pengembangan Kinerja	Persentase tersedianya Kajian Teknis Potensi Investasi	%	DPMPTSP
		Persentase ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih	%	
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	
92.	Program Peningkatan Iklim Investasi	Persentase Peningkatan Penerbitan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)	%	DPMPTSP
		Persentase peningkatan Ijin Usaha Penanaman Modal	%	
		Persentase peningkatan Nilai Realisasi Investasi Tipe 1 dan Tipe 2	%	
93.	Program Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Persentase peningkatan kepeminatan Investasi	%	DPMPTSP
		Persentase peningkatan promosi Penanaman Modal yang ditindak lanjuti dengan komunikasi yang lebih intens (<i>one on one meeting</i>)	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
94.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	%	DPMPTSP
		Persentase perijinan yang bebas calo	%	
		Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu	%	
95.	Program Pengawasan dan Pengendalian perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	DPMPTSP
96.	Program Pengaduan dan Advokasi	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	DPMPTSP
		Persentase tertanganinya gugatan masyarakat yang terselesaikan	%	
97.	Program Pengelolaan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah	%	Dinbudpar
		Persentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/ Sastra yang aktif	%	
		Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang aktif	%	
98.	Program Pengembangan Pariwisata	Persentase pertumbuhan obyek wisata baru	%	Dinbudpar
		Persentase obyek wisata yang berkembang	%	
		Persentase desa wisata unggulan	%	
99.	Program Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku		Dinarpus
100.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Persentase Arsip Konvensional yang dialihmediakan		Dinarpus
101.	Program Pengembangan Budaya Baca	Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung		Dinarpus
102.	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang aktif		Dinarpus
103.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan produksi ikan	%	Dinakan
		Persentase peningkatan produksi benih ikan	%	
		Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum	%	
104.	Program Peningkatan Populasi dan Produksi ternak dan hasil ternak	Persentase peningkatan populasi ternak	%	Dinakan
		Persentase peningkatan produksi ternak	%	
		Persentase peningkatan produk olahan hasil ternak	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
105.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	Prevalensi penyakit hewan	%	Dinakan
		Persentase penurunan kasus penyakit hewan	%	
106.	Program pemenuhan pangan asal hewan	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	Dinakan
107.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah IRBAN I	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan pada wilayah IRBAN I	%	Inspektorat
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti pada wilayah IRBAN I	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN I	%	
108.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah IRBAN II	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan pada wilayah IRBAN II	%	Inspektorat
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti pada wilayah IRBAN II	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN II	%	
109.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah IRBAN III	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan pada wilayah IRBAN III	%	Inspektorat
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti pada wilayah IRBAN III	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN III	%	
110.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah IRBAN IV	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan pada wilayah IRBAN IV	%	Inspektorat
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti pada wilayah IRBAN IV	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN IV	%	
111.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Teknis dan Sertifikasi Profesi	%	Inspektorat

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
105.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	Prevalensi penyakit hewan	%	Dinakan
		Persentase penurunan kasus penyakit hewan	%	
106.	Program pemenuhan pangan asal hewan	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	Dinakan
107.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah IRBAN I	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan pada wilayah IRBAN I	%	Inspektorat
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti pada wilayah IRBAN I	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN I	%	
108.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah IRBAN II	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan pada wilayah IRBAN II	%	Inspektorat
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti pada wilayah IRBAN II	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN II	%	
109.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah IRBAN III	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan pada wilayah IRBAN III	%	Inspektorat
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti pada wilayah IRBAN III	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN III	%	
110.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah IRBAN IV	Prosentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan pada wilayah IRBAN IV	%	Inspektorat
		Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti pada wilayah IRBAN IV	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN IV	%	
111.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah APIP yang mengikuti Diklat Teknis dan Sertifikasi Profesi	%	Inspektorat

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
112.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	%	BAPPEDA
113.	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Evaluasi Renja tepat waktu	%	BAPPEDA
114.	Program pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase hasil pembangunan daerah yang diinformasikan	%	BAPPEDA
		Persentase pemanfaatan data dalam pelaksanaan pembangunan daerah	%	
115.	Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan insfrastruktur	Persentase pelaksanaan Program perencanaan bidang infrastruktur yang ada di RPJMD	%	BAPPEDA
		Persentase pelaksanaan Program perencanaan bidang sumber daya alam yang ada di RPJMD	%	
		Persentase pelaksanaan Program perencanaan bidang ekonomi yang ada di RPJMD	%	
116.	Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan	Persentase pelaksanaan Program perencanaan bidang infrastruktur yang ada di RPJMD	%	BAPPEDA
		Persentase pelaksanaan Program sektoral bidang Kesejahteraan Rakyat	%	
		Persentase pelaksanaan Program perencanaan bidang sumber daya alam yang ada di RPJMD	%	
117.	Program Penelitian dan Pengkajian	Persentase hasil penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah	%	BAPPEDA
118.	Program Evaluasi Kebijakan dan Publikasi Kelitbangan	Persentase raperda yang memiliki naskah akademik	%	BAPPEDA
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengkajian, pengembangan dan penerapan	%	
119.	Program Kerjasama Kelitbangan	Persentase kerjasama kelitbangan	%	BAPPEDA
120.	Program Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	BPPKAD
		Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
121.	Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah	Prosentase Pemutakhiran Obyek Pajak	%	BPPKAD
		Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah tepat waktu	%	
122.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	%	BPPKAD
		Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah tepat waktu	%	
123.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	BPPKAD
		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	
124.	Program Pengelolaan Aset	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset di Satuan Kerja	%	BPPKAD
		Persentase pemanfaatan aset di Satuan Kerja	%	
125.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	%	BPPKAD
		Persentase ketepatan waktu pelaporan Perangkat Daerah	%	
126.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	BKPSDM
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	%	
		Persentase tingkat pendidikan pejabat pengawas	%	
		Persentase tingkat pendidikan pejabat pelaksana	%	
		Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama	%	
		Persentase Keterisian Jabatan Administrator	%	
		Persentase Keterisian Jabatan Pengawas	%	
		Persentase Pejabat Tinggi Pratama perempuan	%	
		Persentase Pejabat Administrator perempuan	%	
		Persentase Pejabat Pengawas perempuan	%	
		Persentase penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
127.	Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	%	BKPSDM
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	%	
128.	Program peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian	Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	BKPSDM
		Persentase ASN yang melakukan updating data	%	
		Persentase keterisian formasi pegawai	%	
		Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu	%	
		Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	%	
129.	Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	Bagian Pemerintahan
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	
		Cakupan kecamatan dan kelurahan tertib administrasi	%	
130.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	Bagian Pemerintahan Desa
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	
131.	Program Pengelolaan Aset Desa	Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	Bagian Pemerintahan Desa
132.	Program Penyusunan dan Penataan Produk Hukum	Persentase Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan	%	Bagian Hukum
		persentase jumlah perda yang ditindaklanjuti dengan perbup	%	
		Persentase Perda yang disosialisasikan	%	
133.	Program Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Presentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	Bagian Hukum
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi	%	
134.	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	Bagian Perekonomian
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	
135.	Program Pengendalian Pelaksanaan -	Cakupan Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Daftar Rencana Usulan Pengadaan tepat waktu	%	Bagian Pembangunan

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
	Kegiatan Pembangunan	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	
		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu	%	
136.	Program Pengembangan Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental	Persentase kegiatan keagamaan skala desa/kelurahan yang dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten	%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan, kondisi baik	%	
		Persentase masyarakat berprestasi yang diberi penghargaan	%	
137.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	Bagian Umum
138.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	Bagian Umum
139.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	Bagian Umum
140.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Ketaatan akan penggunaan Pakaian Dinas Aparatur	%	Bagian Umum
141.	Program Penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik	Persentase temuan tupoksi yang tumpang tindih	%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Standar Pelayanan Publik	%	
		Persentase Penyampaian LKjIP Perangkat Daerah tepat waktu	%	
142.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan Perangkat Daerah.	%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
143.	Program penyelenggaraan kehumasan	Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	%	Bagian Hubungan Masyarakat
		Persentase peningkatan pengunjung website	%	
		Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
144.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Jumlah Perda Inisiatif terhadap Jumlah Raperda	%	Sekretariat DPRD
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	
		persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	
145.	program Penanganan tanggap darurat bencana	Persentase Tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	BPBD
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	
146.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	%	BPBD
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	
147.	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase Tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	BPBD
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	
148.	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	Kesbang
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	
149.	Program peningkatan kewaspadaan nasional	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	Kesbang
150.	Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	Kesbang
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	
151.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	Kesbang
		Cakupan desa/kel yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	
152.	Program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba	Cakupan desa/kel yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	Kesbang
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	PENANGUNG JAWAB
Urusan Penunjang dan Pendukung Operasional yang ada di semua Perangkat Daerah				
153.	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan Perangkat Daerah tepat waktu	%	Semua Perangkat Daerah
		Jumlah Kegiatan Renja PD yang sesuai dengan Renstra PD dibagi jumlah kegiatan dalam renstra dikali 100%	%	
154.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	Semua Perangkat Daerah
155.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	Semua Perangkat Daerah
156.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kepatuhan ASN dalam penggunaan Pakaian dan Atributnya	%	Semua Perangkat Daerah

BAB V
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2019

Tahun 2019 adalah tahun transisi dalam periode perencanaan pembangunan daerah, karena RPJMD tahun 2013-2018 sudah berakhir dan RPJMD periode Tahun 2018-2023 baru akan ditetapkan sebagai Peraturan daerah dalam kurun waktu enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Sehubungan hal tersebut penetapan Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan dengan mendasarkan pada gambaran umum kondisi daerah, capaian kinerja pemerintahan periode sebelumnya, identifikasi permasalahan pembangunan, dan isu strategis daerah dengan metode analisis data dan desk dengan seluruh Perangkat Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Indeks infrastruktur wilayah	-	DPUPKP
2.	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	%	
3.	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	
4.	Persentase penurunan pelanggaran tata ruang	%	
5.	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	%	
6.	Angka kecelakaan lalu lintas	-	Dinhub
7.	Nilai keterbukaan informasi publik pada badan publik	-	Dinkominfo
8.	Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi	%	
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	DLH
10.	Indeks Pencemaran Air	-	
11.	Indeks Pencemaran Udara	-	
12.	Indeks tutupan vegetasi/lahan	-	
13.	Persentase pelayanan sampah perkotaan	%	BPBD
14.	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	
15.	Pertumbuhan ekonomi		Dinkominfo
16.	Pendapatan per Kapita	Rp/Org/Th	
17.	Inflasi	-	
18.	Nilai Tukar Petani	-	Dintan Pangan
19.	Skor Pola pangan harapan	-	
20.	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	-	
21.	Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	-	
22.	Produktifitas Padi	Ton/Ha	Dinakan
23.	Produktifitas Ternak Besar	Kg/Ekor	
24.	Produktifitas Ternak Kecil	Kg/Ekor	
25.	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Org/Th	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
26.	Pertumbuhan sektor perindustrian	%	Dinperindag Kop dan UKM
27.	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	
28.	persentase koperasi aktif	%	
29.	Laju investasi	%	DPMPSTP
30.	Tingkat pengangguran terbuka	%	Dinaker
31.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	
32.	pertumbuhan jumlah wisatawan	%	Dinbudpar
33.	Length of stay (lama tinggal wisatawan)	-	
34.	Indeks Pembangunan Manusia	-	Dinkominfo
35.	Indeks Pendidikan	-	Dindikpora
36.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	-	
37.	Angka Harapan Lama Sekolah	-	
38.	Angka Harapan Hidup	-	Dinkes
39.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	bayi/ 100.000	
40.	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	bayi/ 1.000	
41.	Prevalensi balita Gizi Buruk (0-60 bulan)	%	Dinsos
42.	Angka Kemiskinan	-	
43.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	
44.	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	%	Dindalduk KBPPPA
45.	Indeks Pembangunan Gender	-	
46.	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	Dinarpus
47.	<i>Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan !!!!</i>	%	
48.	Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI)	%	Dindukcapil
49.	Persentase Pelayanan Akta Kelahiran tepat waktu	%	
50.	Tingkat konsistensi program pembangunan daerah	%	BAPPEDA
51.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	ASS ADM
52.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	
53.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	
54.	Nilai EKPPD		ASS PEM
55.	Opini pemeriksaan BPK	WTP	BPPKAD
56.	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	
57.	Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti	%	Inspektorat
58.	Persentase RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA tepat waktu sesuai prolegda	%	Setwan
59.	Persentase ketersediaan barang bersubsidi	%	Ass Ekbang
60.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	%	BKPSDM
61.	Indeks desa membangun	-	Dinpermades
62.	Angka Kriminalitas	-	Satpol PP
63.	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	-	
64.	Cakupan penegakan Perda dan Perbup	%	

BAB VI PENUTUP

Tahun 2019 adalah tahun transisi dalam periode perencanaan pembangunan daerah, karena RPJMD Tahun 2013–2018 sudah berakhir dan RPJMD periode Tahun 2018–2023 baru akan ditetapkan dalam kurun waktu enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Maka berdasarkan amanat Pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2018, bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masa transisi Tahun 2019 ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah untuk masa 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten, gambaran umum kondisi daerah, capaian kinerja pemerintahan periode sebelumnya, identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 merupakan sebuah koridor perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif, yaitu selain tim penyusun dari unsur Bappeda, BPPKAD, Bagian Pemerintahan Setda dan Bagian Ortala Setda, juga melibatkan seluruh perangkat daerah dan Kecamatan. Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang berisi 5 kelompok sasaran, prioritas program pembangunan daerah, indikasi rencana program sebanyak 156 program, dan indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2019.

Dokumen Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2019 dan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2019. Sekaligus sebagai pedoman bagi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO